

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

CINDI YOLA

NPM : 1802110003



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CINDI YOLA
NPM : 1802110003

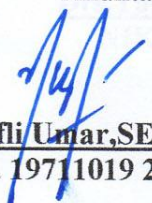
Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**

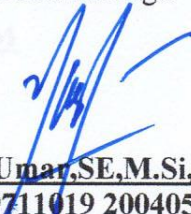
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

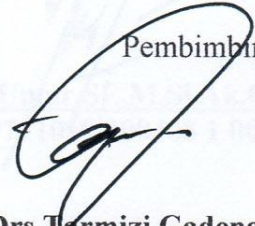
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

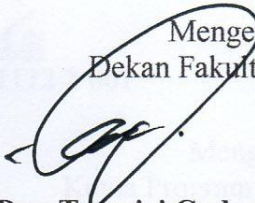
Pembimbing I


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 15 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

CINDI YOLA
NPM : 1802110003

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 27 Januari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 15 Februari 2022
Yang Menyatakan



Cindi Yola

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cindi Yola
NPM : 1802110003
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

Yang Menyatakan,


Cindi Yola

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020.”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng. Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
8. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
9. Ayahanda Burmantisa , Ibunda Nuraini dan abang Dandi Onia Tama yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis Yosi Diantriani, Zakiatul Muna, Asmaul Husna, Rahma Nofiya, Deski Harma Winda, Habsah, Zuhrina. yang telah banyak membantu penulis.
11. Orang yang special bagi saya Renaldy Ilham yang selalu siap saya repotkan, susahkan, yang selalu ada di saat saya butuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 3 Desember 2021

Cindi Yola

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	7
2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2 Anggaran	9
2.1.2.1 Pengertian Anggaran	9
2.1.2.2 Fungsi Anggaran	10
2.1.2.3 Karakteristik Anggaran	12
2.1.2.4 Manfaat Anggaran.....	13
2.1.3 Anggaran Sektor Publik	13
2.1.5.1 Fungsi dan Prinsip Anggaran Sektor Publik	14
2.1.4 Belanja Pemerintah	15
2.1.5 Efektivitas	17
2.1.5.1 Pengertian Rasio Efektivitas	17
2.1.5.2 Pengukuran Rasio Efektivitas	17
2.1.6 Efisiensi.....	19
2.1.6.1 Pengertian Rasio Efisiensi.....	19
2.1.6.2 Pengukuran Rasio Efisiensi	19
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka pemikiran	25
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.1.1 Tujuan Penelitian	27
3.1.2 Jenis Penelitian.....	27
3.1.3 Horizon Waktu	28
3.1.4 Unit Analisis.....	28
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	28

3.3 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Dinas Pangan Aceh	32
4.1.1 Sejarah Dinas Pangan Aceh	32
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pangan Aceh	32
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Aceh.....	33
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh.....	33
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Dinas Pangan Aceh	36
4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Pada Dinas Pangan Aceh	37
4.3 Pembahasan.....	39
4.3.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pangan Aceh.....	39
4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pangan Aceh.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Ralisasi Anggaran Belanja Daerah.....	4
2.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	19
2.2 Kriteria Rasio Efisiensi.....	21
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	23
4.1 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pangan Aceh.....	39
4.2 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pangan Aceh.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	25
4.1 Struktur Organisasi.....	35

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**

CINDI YOLA
NPM : 1802110003

Pembimbing :1) Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
2) Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si,MM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dinas Pangan Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan anggaran dan belanja Dinas Pangan Aceh. Objek penelitian yang digunakan merupakan Dinas Pangan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas anggaran dan belanja dinas pangan Aceh tergolong cukup efektif di tahun 2018 sebesar 89.94%. di tahun 2019-2020 tergolong efektif sebesar 94.85% dan 90.61% (2) efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya efisiensi anggaran di Dinas Pangan Aceh tergolong cukup efisien di tahun 2018 sebesar 80.35%, kemudian di tahun 2019-2020 tergolong efektif sebesar 78.89% dan 65.65%.

Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Anggaran dan Belanja, Dinas Pangan Aceh

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**

CINDI YOLA
NPM : 1802110003

Pembimbing :1) Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
2) Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si,MM

ABSTRAC

This study aims to determine the extent to which the effectiveness and efficiency of the expenditure budget at the Aceh food office. In this study using qualitative methods of data collection techniques, namely observation and interviews. The data used is secondary data in the form of financial reports of the budget and expenditure of the Aceh Food Service. The research object used is the Aceh food Service. The results of the research show that (1) the effectiveness of the budget and the king in the aceh sultanate was classified as quite effective in 2018 of 89.94%. 2019 to 2020 is quite effective at 94.85% and 96.16% (2) efficiency is a measure of the success of an activity that is assessed based on the amount of budget efficiency costs or resources at the aceh warming agency is quite efficient and in 2018 amounting to 80.35% later I 2019 to 2020 classified as effective at 78.89% and 65.65%

**Keywords : Effectiveness, Efficiency, Budget and Spending, Aceh Food
Office**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam sektor publik merupakan penyelenggara pemerintah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat pula, hal

tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif bagi kelangsungan perusahaan.

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang terutama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMEDAGRI) No. 13 tahun 2006. Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil yang telah ditetapkan. Efisiensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMEDAGRI) No 13 tahun 2006 merupakan hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penganggaran barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu.

Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Kepala Dinas Pangan Aceh yaitu supaya anggaran belanja yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam UU No.32/2004 juga disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan perda, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi

Khusus), dan bagi daerah dari dana hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Pemerintah Kota dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Pangan adalah sebuah dinas yang bertanggung jawab akan segala sesuatu yang menyangkut tentang urusan pemerintah dan pembangunan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan untuk melakukan program maka dinas pangan harus membuat sebuah anggaran untuk belanja yang akan digunakan dalam satu periode atau untuk anggaran belanja pada satu tahun periode tersebut.

Upaya penyiapan peningkatan fungsi pelayanan publik, dan pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan di implementasikan oleh Dinas Pangan Aceh menjadi tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas Dinas Pangan Aceh dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menunjukkan sebuah anggaran serta realisasi belanja bagian pertanian pada Dinas Aceh pada 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2018, 2019, 2020, realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan, pada anggaran tahun 2018 realisasi belanja lebih dibandingkan anggaran belanja yaitu 86.87 %,selanjutnya pada tahun 2019 realisasi anggaran meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 94.85 %, selanjutnya

pada anggaran tahun 2020 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 90.61%.

Dari beberapa aspek dari pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Nordiawan dan Ayuningtyas (2016:39). Berikut ini laporan realisasi dan anggaran Dinas Pangan Aceh

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa anggaran	%
2018	Rp. 58.435.542.949.000	Rp. 50.763.885.940.000	Rp. 7.671.675.009.000	86.87%
2019	Rp. 51.381.880.008.000	Rp. 48.738.584.360.650	Rp. 2.623.331.647.350	94.85%
2020	Rp. 32.641.512.241.000	Rp. 29.579.711.451.130	Rp. 3.061.800.789.870	90.61%

Sumber : Dinas Pangan Aceh

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja Dinas Pangan Aceh tahun anggaran 2018 sebesar Rp 58.435.542.949.000 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 50.763.885.940.000. kemudian anggaran tahun 2019 sebesar Rp 51.381.880.008.000 dengan anggaran yang ter realisasi sebesar Rp 48.738.584.360.650, artinya mengalami penurunan presentase dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 32.641.512.241.000 dengan anggaran yang terrealisasi sebesar Rp 29.579.711.451.130 artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari data tersebut, penggunaan anggaran pada Dinas Pangan Aceh mengalami penurunan presentase. Hal ini cukup efektif karena tingkat penggunaan anggaran dari tahun 2018-2020 lebih dari satu sama dengan 80% tetapi penggunaan yang terlalu besar membuat anggaran yang di anggarkan oleh dinas Pangan Aceh menjadi tidak efisien.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar evaluasi kinerja keuangan dan penggunaan anggaran pada dinas Pangan Aceh serta nantinya dapat menjadi masukan dan saran kepada Dinas Pangan Aceh agar mengelola anggaran yang telah di anggarkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian penelitin tentang efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas pangan dengan “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun Anggaran 2018-2020

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan Aceh tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Pada Dinas Pangan Aceh tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua elemen yang membutuhkan dan dijadikan masukan kepada dinas Pangan Aceh.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis, terdapat beberapa manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas, efisiensi dan anggaran belanja.
- b. Manfaat bagi penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan pembahasan pada penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan Aceh tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Bastian (2010:3). Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum, dan, sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Wiratna (2015:1).

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengendalikan manajemen dan pertanggungjawaban Menurut wiratna (2015:10) tujuan akuntansi sektor publik meliputi :

1. Management Control, tujuannya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan / dianggarkan untuk sebuah organisasi.
2. Accountability, tujuan ini hampir sama dengan management control yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manager sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sumber daya/bidang/divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan dana/anggaran publik.

Menurut Reniwijoyo (2016:18) menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan akuntansi sektor publik meliputi :

1. Memberikan informasi yang diperlukan guna mengelola secara efektif, efisien dan ekonomis atas sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer dapat melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab program secara efektif dan efisien dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan bagi pegawai pemerintah dapat melaporkan kepada publik (masyarakat) hasil aktivitas pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

2.1.1.3 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:7) Ruang lingkup akuntansi sektor publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi dan organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan

pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

2.1.1.4 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Halim (2012:5) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca.
6. Motif mencari laba bukan merupakan orientasi utama. Karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan, sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan penghitungan dan pelaporan laba.
7. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, dan kepemilikan tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi sektor publik.
8. Sumber keuangan yang diberikan warga negara tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya warga negara membayar pajak kepada pemerintah, warga negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanan dari pemerintah.

2.1.2 Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah, pengertian anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi

tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No 17 Tahun 2012 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara/daerah (pusat/daerah) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran tersebut setiap tahun diajukan Pemerintah pusat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

M. Nafarin (2017:11) menyatakan anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan menurut Rudianto (2019:2) anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

Prawinegoro (2014:2) Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran

Tujuan anggaran menurut Nafarin (2017:13) adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana;

- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan;
- c. Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan;
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat;
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Menurut Rudianto (2013:5) menjelaskan bahwa anggaran mempunyai

beberapa fungsi yaitu:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan, dan beberapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut.
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah, tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- 4) Anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dan publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

- 5) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian.
- 6) Anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran sebagai instrument untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomi efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah di tetapkan agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat Challenging but attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah, sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
- 7) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

2.1.2.3 Karakteristik Anggaran

Dalam pembuatan anggaran baik itu keuangan ataupun oprasional harus memiliki karakteristtik anggaran yang baik agar memiliki hasil yang baik juga. Menurut mulyadi (2016 : 90) menyatakan bahwa karakteristik anggaran yang baik diantaranya sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dibawah koordinasi tertentu.
- f. Secara berskala kinerja keuangan seseungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

Menurut Indra Bastian (2010:191) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, karakteristik anggaran publik terdiri dari:

- a. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan
- b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
- c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran yang di telah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2.4 Manfaat Anggaran

Menurut Nafarin (2012:13) anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain:

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama
- b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- c. Dapat memotivasi pegawai.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai.
- e. Menghindari penggunaan dana yang tidak perlu.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- g. Dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan.
- h. Dapat dipergunakan sebagai alat perbandingan kinerja di periode yang akan datang

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan dan pembiayaan bagi pemerintah dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Menurut peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian anggaran adalah pendoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana

pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat atau daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mardiasmo (2015:15) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat

2.1.3.1 Fungsi dan Prinsip Anggaran Sektor Publik.

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran menjadi kendali dan tolak ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan. *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang dikutip oleh Haruman (2013:11), mengemukakan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
- c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

- e. Anggaran merupakan alat motivasi dan persuasi tindakan efektif efisien dalam mencapai visi organisasi.
- f. Anggaran merupakan instrument politik.
- g. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal

Sedangkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik menurut Mardiasmo

(2013:60) meliputi :

- a. Otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- c. Kebutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).
- d. *Nondiscretionary appropriation*, yaitu jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus memanfaatkan secara ekonomis, efektif dan efisiensi.
- e. Periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
- f. Akurat, yaitu estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadang yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran.
- g. Jelas, yaitu anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik, yaitu anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.4 Belanja Pemerintah

Pemerintah no 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Definisi lain berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2011⁶ sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua

dengan Pemendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Menurut Siregar (2015) Belanja langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja barang dan jasa.
- c. Belanja modal.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak diperbarui secara langsung oleh program/kegiatan. (Halim,2017). Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Mahmudi,2016). Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai, dengan objek belanja meliputi:
 - a. Gaji dan Tunjangan.
 - b. Tambahan penghasilan PNS.
 - c. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD.
 - d. Biaya pemungutan Pajak daerah.
2. Belanja bunga
 - a. Belanja hibah
 - b. Belanja subsidi
 - c. Belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten kota dan pemerintah desa.

2.1.5 Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Rasio Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Mahmudi (2015:86) menjelaskan bahwa efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengertian efektivitas menurut Jhon (2016:76) adalah pencapaian target keluaran (*output*) yang akan diukur dengan cara membandingkan *output* anggaran dengan *output* realisasi. Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasi pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui ukuran efektivitas (Mario, 2014:134)

2.1.5.2 Pengukuran Rasio Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Kemampuan dalam menjalankan tugas

dikategorikan efektif apabila suatu rasio yang dicapai mencapai 100%. Namun, demikian semakin tinggi ratio efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Mahmudi (2013:164)

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Berikut rumus untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja. Halim (2015:120)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 jika jumlah rasio efektivitas lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan sangat efektif. Selanjutnya ketika jumlah rasio efektivitas berkisar antara 90%-100% maka kemampuan keuangan dikatakan efektif. Jumlah rasio efektivitas berkisar antara 80%-90% maka kemampuan keuangan dikatakan cukup efektif, dan jika rasio efektivitas berkisar antara 60% - 80% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efektif, demikian juga jika rasio efektivitas

<60% maka kemampuan dikatakan tidak efektif. Untuk kriteria rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

2.1.6 Efisiensi

2.1.6.1 Pengertian Rasio Efisiensi

Analisis efisiensi sesuai dengan Kepmendagri No.13 tahun 2016, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output). Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu.

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan output sebesar-besarnya (Ningtyas, 2016:13).

2.1.6.2 Pengukuran Rasio Efisiensi

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja

(Halim, 2016:55). Berikut rumus untuk mengukur tingkat efiseinsi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 jika jumlah rasio efisiensi lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan tidak efisien. Selanjutnya ketika jumlah rasio efesiensi berkisar antara 90% - 100% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efisien. Jumlah rasio efisiensi berkisar antara 80%-90% maka kemampuan dikatakan cukup efisiensi, demikian jika rasio efisiensi <60% maka kemampuan keuangan dikatakan sangat efesien. Untuk kriteria rasio efisiensi dapat dipilih pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisien (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam membuat sebuah penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang sedang dilakukan, pada penelitian terdahulu ada beberapa judul yang memiliki variabel yang sama seperti variabel yang digunakan oleh penulis sehingga bisa menjadi refresiensi bagi penulis untuk

menjadi bahan kajian untuk penelitian ini, Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan efisiensi anggaran belanja diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pattisahusiwa (2018) dengan judul analisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja kota samarinda tahun 2011 -2015 dengan hasil penelitian menunjukan dimana tingkat efektifitas anggaran belanja kurang efektif sementara efesiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh kota samarinda sudah memenuhi dana yang minimum untuk mencapai hasil yang angat efesien.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Widiyana. (2016) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan pemuda Dan Olahraga Kota Palembang dengan hasil penelitian perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014 kinerjanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%. Sementara Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja pada tahun 2011 sebesar 19,38%, pada tahun 2012 tingkat efisiensi realisasi belanja lansung dan realisasi belanja adalah 20,36%, pada tahun 2013 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 19,38% , pada lahun 2014 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasibelanja sebesar 13,55%.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Runtu, (2016) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, Hasil Penelitian dalam penelitian ini bahwa Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2013-2015 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang dianggarkan dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa masih sangat rendah. Sedangkan realisasi kinerja belanja pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basriah (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (bpmd) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif. Rasio efisiensi yang dilakukan selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata pengelolaan anggaran belanja cukup efisien.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	analisis efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran belanja kota samarinda tahun 2011 - 2015. Pattisahusiwa (2018)	Deskriptif	hasil penelitian menunjukan dimana tingkat efektifitas anggaran belanja kurang efektif sementara efesiensi anggaran belanja yang dilakukan oleh kota samarinda sudah memenuhi dana yang minimum untuk mencapai hasil yang sangat efesien.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. Widiyana. (2016)	Deskriptif	hasil penelitian perhitungan tahun 2011 sebesar 91,79% tahun 2012 sebesar 95,00%, tahun 2013 sebesar 93,01%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sudah efektif karena hasil yang dicapai 90% keatas. Sedangkan pada tahun 2014 kineijanya cukup efektif karena hasil yang dicapai hanya sebesar 87,31%. Sementara Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja pada tahun 2011 sebesar 19,38%, pada tahun 2012 tingkat efisiensi	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian

Tabel 2.1 Tabel Lanjutan

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 19,38% , pada tahun 2014 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasibelanja sebesar 13,55%.		
3.	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Runtu, (2016)	Deskriptif	Hasil Penelitian dalam penelitian ini bahwa Realisasi Kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians tahun 2013-2015 dapat dikatakan kurang baik, karena realisasinya tidak mencapai jumlah yang dianggarkan dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa masih sangat rendah. Sedangkan realisasi kinerja belanja pemerintah Kabupaten Minahasa dilihat dari analisis varians secara umum dapat dikatakan baik karena tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.	Realisasi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian

2.1 Tabel Lanjutan

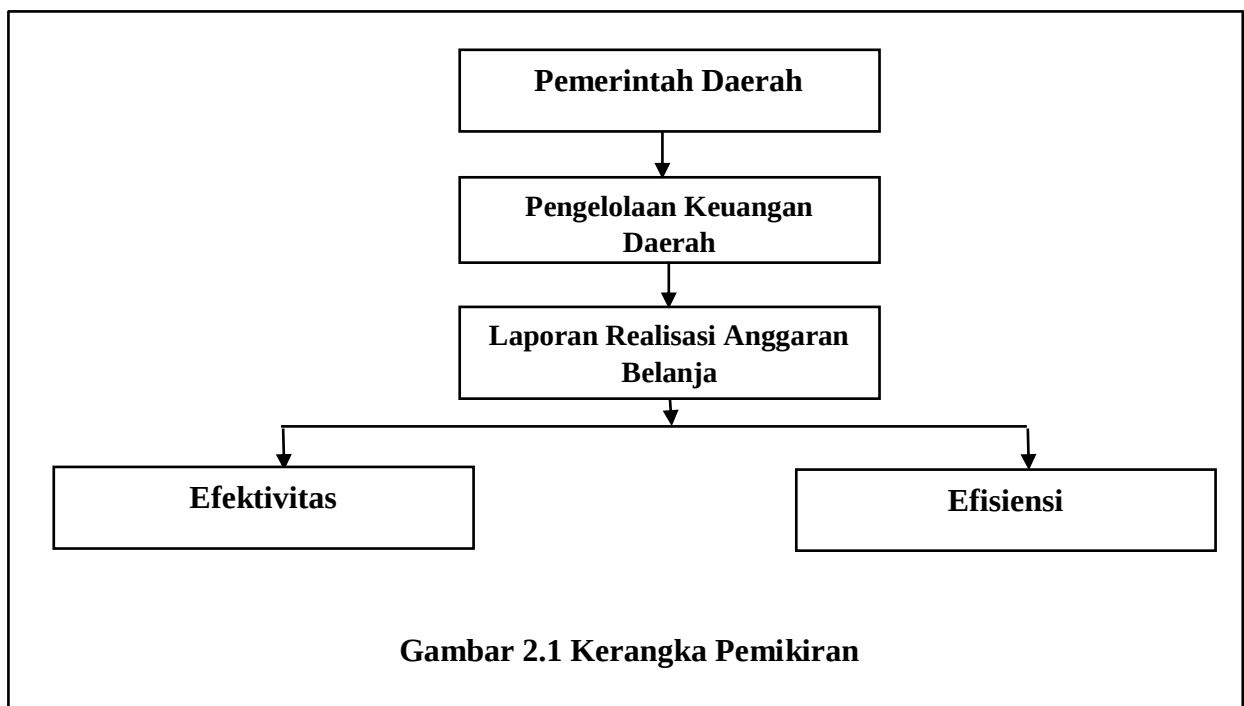
No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Palembang Widiyana (2016)	Deskriptif	Hasil penelitian untuk perhitungan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja setiap tahunnya kriteria efektif dan cukup efektif yaitu untuk tahun 2011, 2012, 2013 mencapai kriteria efektif. Sedangkan untuk tahun 2014 mencapai kriteria cukup efektif.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian
5.	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan realisasi anggaran belanja pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (bpmd) daerah provinsi Sulawesi Tengah Basriah (2017)	Deskriptif	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif. Rasio efisiensi yang dilakukan selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata pengelolaan anggaran belanja cukup efisien.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Pangan Aceh adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang pengelolaan anggaran. Pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio

efektivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah. Efektivitas menggambarkan kemampuan Dinas Pangan Aceh dalam merealisasikan pendapat oleh pemerintah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan yang semakin baik.

Efisiensi menggambarkan kemampuan Dinas Pangan Aceh dalam merealisasikan anggaran belanja langsung dan kemudian dibandingkan dengan merealisasikan anggaran belanja yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini semakin sedikit biaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dapat dikatakan semakin efisien.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu: tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu, dan unit analisis (Sekaran & Bougie, 2017).

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi laporan anggaran belanja pada Dinas Pangan Aceh.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018). Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini,

dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

3.1.3 Horizon waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian *time series*, yaitu penelitian yang pengambilan datanya dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

3.1.4 Unit analisis

Berkaitan dengan penentuan masalah apa yang dimaksud, peneliti membutuhkan laporan realisasi anggaran dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini maka unit analisis yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran Dinas Pangan Aceh.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berupa wawancara langsung pejabat yang membuat laporan keuangan dan penanggung jawab

2. Data Sekunder

Merupakan sumber atau data yang diperoleh melalui pengumpulan data laporan realisasi anggaran belanja yang bersumber dari laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Aceh.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa metode:

1. Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang menggunakan sumber data sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif dan sistematis
2. Wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan secara terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena wawancara tidak terstruktur dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden tentang garis besar objek peneliti saja tidak secara lengkap menyeluruh (detail)
3. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi, yakni dengan mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran belanja tahun 2018 sampai 2020.

3.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, teknik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono,2018).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan target belanja dengan realisasi belanja yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran Dinas Pangan Aceh tahun 2018-2020.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan. Analisis efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran (Halim,2015).

Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas anggaran adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran mencapai lebih dari 100% maka anggaran dapat dikatakan sangat efektif dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran di bawa 60% maka anggaran dikatakan tidak efektif. Dengan kata lain semakin besar tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk hasil yang diterima (Halim,2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi anggaran adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60%, maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran di atas 100% maka anggaran dapat dikatakan tidak efisien. Dengan kata lain semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efisien, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pangan Aceh

4.1.1 Sejarah Dinas Pangan Aceh

Dinas Pangan Aceh sebagai organisasi pemerintahan di Daerah Aceh telah berdiri dan terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan terus berlanjut kemasa pemerintahan penduduk Jepang dan hingga sampai saat ini. Alamat Dinas Pangan Aceh terletak di komplek keistimewaan aceh, jl teuku nyak arief, jeulingke, kec syiah kuala, kota banda aceh, aceh 23115.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pangan Aceh

1. Visi

Terwujudnya kemandirian pangan aceh

2. Misi

- a. Melaksanakan birokrasi pelayanan yang professional, bersih dan memiliki integritas kerja yang tinggi
- b. Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkelanjutan
- c. Meningkatkan sistem distribusi dan akses pangan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya
- d. Meningkatkan mutu konsumsi yang berbasis beragam, berimbang, bergizi dan aman (B2SA), melalui diversifikasi pangan yang berbasis bahan baku pangan lokal dan kewaspadaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, meningkatkan pengembangan mutu dan keamanan pangan masyarakat
- e. Meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan petani dalam pelaksanaan penyuluhan.
- f. Mengembangkan sistem pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai kearifan lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat.
- g. Mengembangkan sistem pelatihan manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis yang handal.
- h. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian, pangan segar dan harga produk pertanian.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Aceh

Tugas Dinas Pangan Aceh melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan. Adapun fungsi Dinas Pangan Aceh antara lain :

1. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
3. Pelaksanaan pengorganisasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.
7. Pembinaan UPTD dan
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang pangan.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang organisasi perangkat daerah. Dinas Pangan Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pertanian.

Kepala Dinas Pangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris, 3(tiga) orang kepala bidang, 3(tiga) orang kepala sub bagian, 9(Sembilan) orang kepala seksi serta, 1(satu) orang kepala UPTD RPH. Selain itu ada kelompok jabatan fungsional yang berfungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha

Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan.
3. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - b. Seksi Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan.
 - c. Seksi Ketersedian, Kerawanan dan Keamanan Pangan
4. Bidang Pertanian
 - a. Seksi Pertanian
 - b. Seksi Perternakan
 - c. Seksi Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan
 - b. Seksi Perikanan Budidaya
 - c. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Rumah potong Hewan Terpadu, membawahi Sub Tata Usaha

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Dinas Pangan Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif 100% maka dinilai sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka dinilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efektivitas anggaran tahun 2018 :

$$2018 = \frac{\text{Rp.50.763.885.940}}{\text{Rp.56.436.542.949}} \times 100\% = 89.94 \%$$

Pada tahun 2018 target anggaran Dinas Pangan Aceh adalah Rp. 56.436.542.949 dan anggaran yang terealisasi Rp.50.763.885.940 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 89.94%. rasio efektivitas antara 80% - 90% dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini berarti kinerja Dinas Pangan Aceh menunjukkan kineja yang cukup baik

Efektivitas anggaran tahun 2019 :

$$2019 = \frac{\text{Rp.48.738.584.360}}{\text{Rp.51.381.880.008}} \times 100\% = 94.85\%$$

Pada tahun 2019 target anggaran Dinas Pangan Aceh adalah Rp. 51.381.880.008 dan anggaran yang terealisasi Rp.48.738.584.360 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 94.85%. Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pangan Aceh menunjukkan kinerja yang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2020 :

$$2020 = \frac{\text{Rp.29.579.711.451}}{\text{Rp.32.641.512.241}} \times 100\% = 90.61 \%$$

Pada tahun 2020 target anggaran Dinas Pangan Aceh adalah Rp. 32.641.512.241 dan anggaran yang terealisasi Rp.29.579.711.451 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 90.61 %. Rasio efektivitas antara 90%-100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pangan Aceh menunjukkan kinerja yang baik.

4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan anggaran belanja. Kinerja anggaran pemerintah dapat dikatakan efisien apabila semakin sedikit jumlah dana yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi anggaran tahun 2018

$$2018 = \frac{\text{Rp.40.790.642.785}}{\text{Rp.50.763.885.940}} \times 100\% = 80.35 \%$$

Pada tahun 2018 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pangan Aceh Rp.40.790.642.785 dengan realisasi anggaran belanja Rp.50.763.885.940, menunjukkan rasio efisiensi sebesar 80.35%. Rasio efisiensi antara 80%-90% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pangan Aceh pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang cukup efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2019

$$2019 = \frac{\text{Rp.38.453.236.311}}{\text{Rp.48.738.584.360}} \times 100\% = 78.89 \%$$

Pada tahun 2019 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pangan Aceh Rp.38.453.236.311 dengan realisasi anggaran belanja Rp.48.738.584.360, menunjukkan rasio efisiensi sebesar 78.89%. Rasio efisiensi antara 60%-80% dapat dikatakan efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pangan Aceh pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2020

$$2020 = \frac{\text{Rp.19.420.650.953}}{\text{Rp.29.579.711.45}} \times 100\% = 65.65 \%$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pangan Aceh Rp.19.420.650.953 dengan realisasi anggaran belanja Rp.29.579.711.451, menunjukkan rasio efisiensi sebesar 65.65%. Rasio efisiensi antara 60%-80% dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Pangan Aceh pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang cukup efisien.

4.3 Pembahasan

4.3.1.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pangan Aceh

Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif dengan beberapa nilai perhitungan rasio semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Hasil penelitian rasio efektivitas anggaran belanja Dinas Pangan Aceh dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Pangan Aceh

Tahun	Anggaran Belanja			
	Realisasi Anggaran	Target Anggaran	Presentase	Keterangan
2018	Rp. 50.763.885.940	Rp. 56.436.542.949	89.94%	Cukup Efektif
2019	Rp. 48.738.584.360	Rp.51.381.880.008	94.85%	Efektif
2020	Rp. 29.579.711.451	Rp. 32.641.512.241	90.61%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pangan Aceh adalah 89.94% yang artinya Dinas Pangan Aceh dinilai cukup

efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 80%-90% hal ini berarti kinerja Dinas pangan aceh pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

2. Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Aceh adalah 94.85% yang artinya Dinas Pangan Aceh dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90-100%. Hal ini berarti dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pangan Aceh pada tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik.

3. Tahun 2020

Pada tahun 2020 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Aceh adalah 90.96% yang artinya Dinas pangan Aceh dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio efektifnya 90-100%. Hal ini berarti dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pangan Aceh pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Anggaran belanja yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena proses perumusan anggaran belanja tidak dibahas dengan matang. Koordinasi antar ini juga menjadi faktor penyebab yang lain. Bisa jadi anggaran yang dipakai bertahun-tahun ini merupakan proses anggaran yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga anggaran tersebut tidak mencerminkan program kerja yang nyata bagi Dinas Pangan Aceh yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja menjadi tidak bisa maksimal.

4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh

Pengukuran kinerja Dinas Pangan Aceh dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung, tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran.

Hasil penelitian rasio efisiensi anggaran belanja Dinas Pangan Aceh dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pangan Aceh

Tahun	Anggaran Belanja			
	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Presentase	Keterangan
2018	Rp. 40.790.642.785	Rp. 50.763.885.940	80.35%	Cukup Efisien
2019	Rp. 38.453.236.311	Rp.48.738.584.360	78.89%	Efisien
2020	Rp. 19.420.650.953	Rp. 29.579.711.451	65.65%	Efisien

Sumber: data diolah, 2021

1. Tahun 2018

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Aceh adalah 80.35%. Artinya Dinas Pangan Aceh dinilai cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 80%-90%. Hal ini berarti Dinas Pangan Aceh pada tahun 2018 dinilai cukup baik .

2. Pada tahun 2019

Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Aceh adalah 78.89% artinya Dinas Pangan Aceh dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Dinas Pangan Aceh pada tahun 2019 dinilai baik .

3. Tahun 2020

Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pangan Aceh adalah 65.65%. artinya Dinas Pangan Aceh dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dimana rasio efisiensinya 60%-80%. Hal ini berarti Dinas Pangan Aceh pada tahun 2020 dinilai baik .

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukan sebagian besar sumber dana yang dimiliki oleh Dinas Pangan Aceh kurang mampu diwujudkan dan digunakan untuk kepentingan belanja organisasi. Dana yang berasal dari anggaran belanja tersebut kurang mampu dioptimalkan dengan baik untuk menghasilkan sesuatu yang mencapainya lebih tinggi dari yang diharapkan sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas anggaran Dinas Pangan Aceh tergolong cukup efektif. Rasio anggaran dari tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 89.94% dimana jumlah persentasenya berada di kategori cukup efektif. Tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 94.85% rasio tersebut masuk ke dalam kategori efektif dan tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 90.61% dimana rasio tersebut menunjukkan kategori yang efektif. Tingkat efektivitas anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut merupakan hal yang kurang baik karena diiringi dengan peningkatan dan penurunan pengelolaan anggaran.
2. Efisiensi anggaran Dinas Pangan Aceh. Rasio efisiensi anggaran dari tahun 2018 sebesar 80.35% dimana jumlah persentasenya berada di kategori cukup efisien. Tahun 2019 sebesar 78.89% termasuk ke dalam kategori efisien dan tahun 2020 sebesar 65.65% berada di kategori efisien. Tingkat efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Dinas Pangan Aceh, Yaitu:

1. Dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan yang sebenarnya, maka kiranya perlu diambil beberapa kebijaksanaan agar perusahaan mampu memperhitungkan estimasi-estimasi kejadian pada masa yang akan datang sehingga realisasi dengan anggaran tidak jauh berbeda.
2. Mengingat pentingnya suatu efektivitas dan efisiensi dalam sebuah perusahaan, maka sebaiknya anggaran dan program disusun secara teliti dan sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Nofita, S. , Sri Mintarti. Salmah Pattisahusiwa, (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal Kinerja Keuangan Pemerintah
- Halim, (2012). Inti Sari Manajemen Keuangan. Jakarta. Pt. Grasindo.
- Haruman, (2013). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Skripsi Semarang : Universitas Dian Nuswantoro
- Indra. Bastian, (2010) .Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Semarang: Pt. Gramedia
- Jhon, (2016) Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan”. *Journal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327 Tahun 1996. Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan. Jakarta : Sekretariat Negara
- Mardiasmo, (2013). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Cv Andi
- Mardiasmo, (2013). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Cv Andi
- Mardiasmo, (2014). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat, Yogyakarta: Cv Andi
- Mardiasmo, (2014). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat, Yogyakarta: Cv
- Mario, (2014) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta UPP STIM YKPN.
- Mulyadi, (2016) System Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, M, (2017). Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan, Dedi Dan Ayuningtyas Hertianti, (2016). Akuntansi Sektor Public. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21. Tentang Klasifikasi Belanja Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun (2005). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Reniwijoyo, (2016). “Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Kebumen” *Journal of Chemical Information and Modeling lib*.STIE Putrabangsa ac.id.
- Rudiantoro (2013). Metodologi Peneitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi 1. Cetakan Ketiga, Penerbit Bpfeyogyakarta: Yogyakarta
- Sekaran, Bougie (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar,(2015) Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan. BEFE, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2018). Metode Peneitian Bisnis. Cetakan Keempat Belas, Penerbit Cv. Alfabeta: Bandung
- Wijaya, Anita, (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Wiratna, (2015). Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching. *Jumal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 10 No. 2.November.